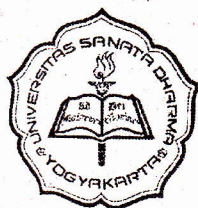


# Kurikulum 2013 Dibatalkan atau Dievaluasi?

Oleh: Hendra Kurniawan



REAKSI beragam muncul saat Menteri Pendidikan Dasar Menengah dan Kebudayaan Anies Baswedan mengumumkan pembatalan Kurikulum 2013 pada Jumat (5/12/2014) malam lalu. Melalui Surat Edaran Nomor 179342/MPK/KR/2014 tertanggal 5 Desember 2014, pelaksanaan Kurikulum 2013 resmi dihentikan. Artinya mulai semester genap 2014/2015, sistem pendidikan nasional kembali menggunakan Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP) 2006. Terkecuali bagi sekolah-sekolah yang sudah melaksanakan Kurikulum 2013 selama tiga semester diminta untuk terus melanjutkannya sepanjang tidak keberatan dan tidak mengalami banyak kendala.

Kenyataan yang berkembang selama ini muncul banyak desakan agar pemerintah segera mengevaluasi pelaksanaan Kurikulum 2013. Keluhan terutama datang dari guru dan siswa. Banyak guru yang belum siap menerapkan Kurikulum 2013 dikarenakan pelatihan guru yang tidak merata. Hal ini berakibat pada timbulnya banyak persepsi dalam pelaksanaan pembelajaran di sekolah sesuai Kurikulum 2013. Belum lagi soal kesiapan buku teks yang hingga sekarang masih banyak sekolah belum menerimanya. Ketiadaan material pendukung Kurikulum 2013 membuat siswa semakin tidak siap untuk menerima pembelajaran. Kondisi ini tentu membuat repot orangtua saat mendampingi anak belajar di rumah. Masih ditambah dengan bertambahnya jam belajar anak di sekolah dengan beban belajar yang semakin tinggi.

Persoalan penilaian hasil belajar

siswa juga ternyata tidak kalah pelik. Sebagian besar guru mengalami kesulitan dalam menyelesaikan berbagai administrasi penilaian yang begitu banyak. Pemberian nilai untuk setiap ranah dari kognitif, afektif, dan psikomotorik memang bertujuan baik dalam kerangka penilaian yang otentik dan komprehensif. Sistem penilaian menurut Kurikulum 2013 tidak hanya dilakukan secara numerik namun juga disertai narasi.

Hal ini pada akhirnya menambah beban administrasi yang harus dilakukan oleh guru. Perhatian guru dapat terpecah dan akan mengakibatkan proses pembelajaran menjadi kurang berkualitas. Persoalan administrasi bukan sekedar persoalan pembiasaan. Bagaimana pun juga dengan beban yang demikian besar dibutuhkan tenaga guru yang lebih banyak agar dapat memberi perhatian secara lebih personal pada siswa.

Penghentian Kurikulum 2013 disambut positif oleh guru, siswa, dan orangtua. Artinya untuk saat ini dirasa beban berat yang mereka hadapi telah berakhir. Akan tetapi sekian banyak anggaran yang telah dikeluarkan selama ini untuk mewujudkan Kurikulum 2013 jangan sampai terbuang sia-sia. Penghentian Kurikulum 2013 tidak hanya berangkat dari persoalan teknis yang juga menjadi tanggung jawab pemerintah. Secara substantif ada beberapa hal yang perlu diperbaiki karena belum selarasnya gagasan dengan

isi kurikulum.

Di sisi lain sebenarnya ada beberapa hal positif yang dimiliki oleh Kurikulum 2013 yang tidak tertampung dalam kurikulum sebelumnya. Semangat pendidikan karakter yang diusung oleh Kurikulum 2013 tentu dapat diapresiasi, utamanya dalam menanamkan nilai-nilai kebangsaan.

Buktinya Kurikulum 2013 memberi porsi yang besar untuk mata pelajaran Sejarah.

Jika Kurikulum 2013 benar-benar dibatalkan maka perlu dipikirkan pula sekolah-sekolah yang sudah terlanjur menambah jumlah guru Sejarah. Kurikulum 2013 juga membuka peluang lebih banyak bagi siswa untuk mengembangkan kemampuannya dalam berpikir kritis. Siswa diajak untuk belajar dengan pendekatan saintifik sampai pada belajar melakukan riset. Hal ini penting untuk mempersiapkan siswa dalam menghadapi persaingan global di masa depan.

Maksud pemerintah saat ini tentu bukanlah pembatalan Kurikulum 2013 secara total. Ke depan setelah dievaluasi, diharapkan Kurikulum 2013 dapat dilanjutkan pelaksanaannya namun secara lebih efektif dan tepat sasaran. Selama ini memang Kurikulum 2013 terkesan kejar tayang, kurang persiapan, dan tergesa-gesa dalam penerapannya. Perlu kajian dan evaluasi mendalam dengan memanfaatkan beberapa sekolah yang sudah ditetapkan un-

tuk meneruskan pelaksanaan Kurikulum 2013. Dari hal itu dapat diambil kebijakan lanjutan untuk menyempurnakan Kurikulum 2013.

Jika kembali pada KTSP untuk seterusnya dapat dinilai sebagai suatu kemunduran, namun mempertahankan Kurikulum 2013 untuk terus dilaksanakan tanpa evaluasi juga bukan hal yang bijak. Apabila pemerintah kemudian membuat kurikulum yang sama sekali berbeda tentu jauh tidak populer karena hanya akan mempertajam keyakinan ganti menteri ganti kurikulum. Hal ada jalan tengah yang terbaik guna menyelamatkan pendidikan nasional. Dibutuhkan kesigapan pemerintah untuk segera melakukan evaluasi dan mencari solusi agar Kurikulum 2013 dapat kembali dilanjutkan dengan lebih baik.

Paling tidak ada tiga hal pokok yang harus diperbaiki dalam implementasi Kurikulum 2013. *Pertama* mengenai sosialisasi dan pelatihan kurikulum yang matang dan merata. *Kedua* soal pengadaan buku yang perlu diperhatikan lagi kualitas dan distribusinya. *Ketiga* mengenai perbaikan sistem penilaian agar lebih efektif dan tidak justru memberani guru.

Akhirnya pendidikan memang sulit dilepaskan dari unsur politik namun mengedepankan hak rakyat untuk memperoleh pendidikan yang baik merupakan kewajiban pemerintah. Ini penting demi terwujudnya tujuan bernegara mencerdaskan kehidupan bangsa. \*\*\*

**Hendra Kurniawan MPd, Dosen Pendidikan Sejarah FKIP Universitas Sanata Dharma Yogyakarta**